

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga pemerintahan adalah organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan

masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2001: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses

pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Karenanya organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefisiensikan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik (Indra Bastian, 88)

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Bekasi antara lain:

- (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.
- (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding Pendapatan Transfer.
- (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.
- (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak

ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Bekasi, karena itu Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKD Kabupaten Bekasi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "*Analisis Rasio Kinerja Keuangan*

*Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2016.”*

## **B. Identifikasi Masalah**

Ada masalah politis saat berbicara mengenai prioritas alokasi dan masalah ekonomi ketika bicara sumber pendanaannya. Menganalisa keuangan di Indonesia mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi yaitu:

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi di daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
4. Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, melihat

kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan melihat kinerja keuangan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD. Dengan digunakannya analisis keuangan tersebut maka akan memberikan suatu hasil perbandingan kinerja keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana nantinya akan menggambarkan kondisi Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Kemandirian.
3. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
4. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
5. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi jika dilihat dari Rasio Keserasian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi dengan menerapkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Bekasi ditinjau dari teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk Menganalisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Bekasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk menganalisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Bekasi.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

## F. Kerangka Pemikiran

Menganalisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Bekasi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKD Kabupaten Bekasi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKD Kabupaten Bekasi :



Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

### Paradigma Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah  
Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2016

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
3. Rasio Efektivitas PAD
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
5. Rasio Keserasian

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Bekasi Tahun 2012-2016